

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti Pendidikan dasar. Demikian juga dengan tingkat pemerataan mutu Pendidikan sekolah secara nasional masih memperlihatkan perbedaan yang jauh, antara sekolah di kota besar dengan sekolah yang berada di pedesaan.

Pendidikan yang bermutu merupakan kondisi yang ingin dicapai semua sekolah. Pendidikan dapat bermutu terlihat dari *output* yang dihasilkan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Semakin baik proses pembelajaran berlangsung, maka semakin baik pula mutu pendidikan. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan, telah ditetapkan secara rinci komponen-komponen pendidikan yang harus diwujudkan mutunya dengan suatu standar tertentu

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan

Formatted: Centered, Space After: 8 pt, Line spacing: Multiple 1,08 li

Formatted: Normal

Formatted: Font: Trebuchet MS, 9 pt, Complex Script Font: 9 pt, Bold

bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

Rahma Riyan Diana, 2018
PENGARUH KESEHATAN PENGANGGARAN TERHADAP MUTU SEKOLAH
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA CIMAH!
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Formatted: Left

Formatted: Normal

Formatted: Font: Trebuchet MS, 9 pt, Complex Script Font:
9 pt, Bold

Triatna (2015, hlm. 3) mengidentifikasi permasalahan mutu pendidikan dari sudut pandang sistem, yaitu masalah ada pada komponen masukan (*input*), proses, hasil pendidikan (*output*), dan dampak (*outcome*) pendidikan. Masalah pendidikan dilihat dari komponen masukan adalah terkait dengan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang seharusnya disediakan secara penuh untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan.

Dengan adanya Standar Nasional Pendidikan, seharusnya kinerja sekolah dalam mengelola pendidikan dapat lebih efektif dan efisien namun faktanya Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan data Analisis Kondisi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2017 diantaranya adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Hal ini sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1
Capaian Standar Nasional Pendidikan
Setiap Jenjang Pendidikan

	Standar Kompetensi Lulusan	Standar Isi	Standar Proses	Standar Penilaian Pendidikan	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	Standar Pengelolaan Pendidikan	Standar Pembiayaan
■ Jenjang SD	5.04	4.72	4.97	4.07	3.24	4.56	4.17	3.92
■ Jenjang SMP	4.96	4.62	4.94	4.05	3.03	4.54	4.13	3.95
■ Jenjang SMA	5.42	4.58	4.93	4.08	3.23	4.72	4.18	3.73
■ Jenjang SMK	4.77	4.78	4.87	4	2.98	3.75	3.98	3.66

Formatted: Left

Formatted: Normal

Formatted: Font: Trebuchet MS, 9 pt, Complex Script Font: 9 pt, Bold

Rahma Riyan Diana, 2018

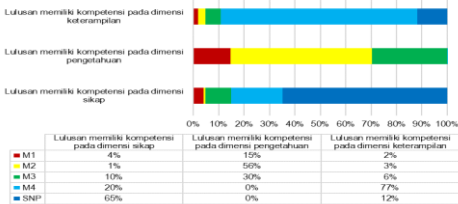
PENGARUH KESEHATAN PENGANGGARAN TERHADAP MUTU SEKOLAH
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA CIMAHI
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Analisis Kondisi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, 2017, hlm. 95.

Secara umum penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih banyak yang berada dibawah Standar Nasional Pendidikan (SNP). Gambar tersebut menunjukkan bahwa Standar Kompetensi Lulusan memiliki nilai tertinggi padahal sumberdaya yang dimiliki belum mendukung penyelenggaraan pendidikan yang baik, misalnya kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan (dengan nilai terendah), isi kurikulum, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, pengelolaan sekolah, maupun pembiayaan. Mutu pendidik dan tenaga kependidikan memiliki rata-rata nilai capaian termasuk dalam kategori menuju SNP tingkat 2.

Tabel 1.2

Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang SMP per Indikator



Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Analisis Kondisi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, 2017, hlm. 36.

Pada Standar Kompetensi Kriteria kompetensi lulusan terdiri dari tiga ranah yaitu sikap, ketrampilan, dan

Formatted: Left

Formatted: Normal

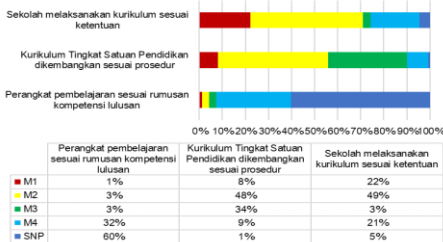
Formatted: Font: Trebuchet MS, 9 pt, Complex Script Font: 9 pt, Bold

Rahma Riyan Diana, 2018
PENGARUH KESEHATAN PENGANGGARAN TERHADAP MUTU SEKOLAH
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA CIMAHI
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
 perpustakaan.upi.edu

pengetahuan. Kondisi yang ditemukan tiap dimensi adalah : 1) dimensi sikap, termasuk dalam dalam kategori menuju SNP tingkat 4 dengan rata-rata nilai capaian 6,10, 2) dimensi pengetahuan, Nilai capaian sebesar 3,00 dan termasuk dalam kategori menuju SNP tingkat 2; 3) dimensi keterampilan, Nilai capaian indikator lulusan yang memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan termasuk dalam kategori menuju SNP tingkat 2 dan merupakan indikator dengan capaian terkecil dibanding dengan indikator lainnya.

Secara Keseluruhan Standar kompetensi kelulusan pada Sekolah jenjang SMP baik dengan nilai capaian 4,96 dan termasuk dalam kategori menuju SNP tingkat 3. Belum terdapat sekolah pada jenjang SMP yang berhasil mencapai SNP secara sempurna untuk standar kompetensi lulusan. Provinsi Papua merupakan salah satu wilayah yang belum sesuai standar;

Tabel 1.3
Capaian Standar Isi Jenjang SMP per Indikator



Formatted: Left

Formatted: Normal

Formatted: Font: Trebuchet MS, 9 pt, Complex Script Font: 9 pt, Bold

Rahma Riyan Diana, 2018
[PENGARUH KESEHATAN PENGANGGARAN TERHADAP MUTU SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA CIMAHU](#)
[Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu](#)

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Analisis Kondisi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, 2017, hlm. 38.

Pada Standar Isi, Capaian standar isi diukur menggunakan tiga indikator, yaitu perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan; KTSP dikembangkan sesuai prosedur; dan sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan. Kondisi yang ditemukan tiap dimensi adalah : 1) perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan, Nilai capaian sebesar 6,26 dengan kategori menuju SNP tingkat 4; 2) KTSP dikembangkan sesuai prosedur, Termasuk dalam kategori menuju SNP tingkat 2 dengan capaian nilai sebesar 3,47; 3) melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan, Rata-rata nilai 4,14 dengan kategori menuju SNP tingkat 3.

Secara Keseluruhan Capaian standar isi pada jenjang SMP dengan nilai sebesar 4,62 termasuk dalam kategori menuju SNP tingkat 3. Permasalahan yang muncul dalam standar isi adalah sekolah belum mampu melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan dan KTSP belum dikembangkan sesuai prosedur. Rata-rata sekolah yang melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan termasuk dalam kategori menuju SNP tingkat 2 sedangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai di prosedur hanya dilaksanakan oleh 49% sekolah jenjang SMP di Indonesia

Tabel 1.4.

Capaian Standar Proses Jenjang SMP per Indikator



Rahma
PENGAR
PADA SE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Formatted: Left

Formatted: Normal

Formatted: Font: Trebuchet MS, 9 pt, Complex Script Font: 9 pt, Bold

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Analisis Kondisi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, 2017, hlm. 40.

Standar proses diukur berdasarkan tiga indikator, yaitu perencanaan proses pembelajaran; proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat; dan pengawasan dilakukan dalam proses pembelajaran. Kondisi yang ditemukan: 1) merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan, Termasuk dalam kategori menuju SNP tingkat 4 dengan capaian nilai 5,43, Capaian sub-indikator perencanaan yang mengarah pada pencapaian kompetensi dan adanya evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas termasuk dalam kategori menuju SNP tingkat 4 yang berarti telah dilaksanakan dengan baik. Namun, berbeda dengan perencanaan proses pembelajaran yang mengacu pada silabus yang telah dikembangkan dan menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis termasuk dalam kategori menuju SNP tingkat 3 yang berarti perlu pengawasan; 2) proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat, Nilai capaian sebesar 5,05 dan termasuk dalam kategori menuju SNP tingkat 3; 3) pengawasan dilakukan dalam proses pembelajaran, Nilai capaian sebesar 4,34 dan termasuk kategori menuju SNP tingkat 3.

Secara Keseluruhan nilai capaian pemenuhan standar proses pada jenjang SMP dengan rata-rata nilai capaian sebesar 4,94 dan termasuk dalam kategori menuju SNP tingkat 3, Sekolah yang telah merencanakan proses pembelajaran sesuai SNP terdapat sekitar 75%. Capaian sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan tepat rata-rata termasuk dalam kategori menuju SNP tingkat 4. Tetapi ditemukan bahwa Provinsi Papua merupakan wilayah yang dalam proses pembelajarannya belum sesuai standar

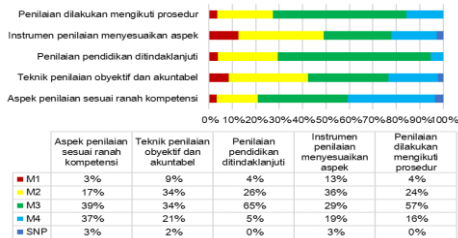
Rahma Riyan Diana, 2018
[PENGARUH KESEHATAN PENGANGGARAN TERHADAP MUTU SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA CIMAHU](#)
[Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu](#)

Formatted: Left

Formatted: Normal

Formatted: Font: Trebuchet MS, 9 pt, Complex Script Font: 9 pt, Bold

Tabel 1.5.
Capaian Standar Penilaian Pendidikan Jenjang SMP
per Indikator



Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Analisis Kondisi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, 2017, hlm. 43.

Lima indikator pembentuk standar penilaian yaitu penilaian sesuai ranah kompetensi; teknik penilaian obyektif dan akuntabel; penilaian pendidikan ditindaklanjuti; instrumen penilaian menyesuaikan aspek; dan penilaian dilakukan mengikuti prosedur. Kondisi yang ditemukan: 1) penilaian sesuai ranah kompetensi, Rata-rata nilai capaian sebesar 4,60 dan termasuk dalam kategori menuju SNP tingkat 3,2) teknik penilaian obyektif dan akuntabel, Rata-rata nilai capaian 3,89 dan termasuk kategori menuju SNP tingkat 3, 3) penilaian pendidikan ditindaklanjuti, Termasuk kategori menuju SNP tingkat 3 dengan nilai capaian sebesar 3,95, 4) instrumen penilaian menyesuaikan aspek, Termasuk kategori menuju SNP tingkat 3 dan nilai capaian sebesar 3,70. 5) penilaian dilakukan

Formatted: Left

Formatted: Normal

Formatted: Font: Trebuchet MS, 9 pt, Complex Script Font: 9 pt, Bold

Rahma Riyan Diana, 2018
PENGARUH KESEHATAN PENGANGGARAN TERHADAP MUTU SEKOLAH
 PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA CIMAH!
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
 perpustakaan.upi.edu

mengikuti prosedur, Nilai capaian sebesar 4,08 dengan kategori menuju SNP tingkat 3.

Kelima indikator pembentuk nilai standar penilaian memiliki nilai capaian yang hampir sama dan termasuk pada kategori menuju SNP tingkat 3 kecuali indikator terkait instrumen penilaian termasuk dalam kategori menuju SNP tingkat 2. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penilaian pendidikan jenjang SMP belum terlaksana sesuai dengan SNP dan standar ini termasuk dalam kategori menuju SNP tingkat 3 sampai menuju SNP tingkat 4.

Secara Keseluruhan Capaian nilai pemenuhan standar penilaian memiliki nilai yang cukup baik yaitu 4,05 dan termasuk dalam kategori menuju SNP tingkat 3. Namun, belum terdapat SMP yang mencapai SNP. (Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Analisis Kondisi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, 2017)

Berdasarkan data di atas, mutu pendidikan di Indonesia pada tahun 2017 secara nasional belum mencapai target standar yang diharapkan. Berdasarkan data diatas, permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan berkaitan dengan aspek SNP di atas dialami oleh setiap satuan pendidikan di berbagai kota/kabupaten. Salah satu permasalahan yang muncul berdasarkan isi dari RPJMD Kota Cimahi tahun 2012-2017, yaitu belum optimalnya aksesibilitas dan kesempatan memperoleh pendidikan oleh sebagian masyarakat karena faktor ekonomi dimana hal ini merupakan alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak memiliki biaya sekolah maupun karena harus bekerja (Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2012-2017, Bab IV hlm. 3)

Pada tahun 2014 angka partisipasi sekolah (APS) Kota cimahi untuk kelompok usia 7-12 tahun mencapai 99,66 persen,

Rahma Riyan Diana, 2018
[PENGARUH KESEHATAN PENGANGGARAN TERHADAP MUTU SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA CIMAH](#)
[Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu](#)

Formatted: Left

Formatted: Normal

Formatted: Font: Trebuchet MS, 9 pt, Complex Script Font: 9 pt, Bold

usia 13-15 tahun sebesar 96,79 persen, usia 16-18 tahun sebesar 83,89 persen dan usia 19-24 mencapai 33,89 persen. Dapat disimpulkan bahwa angka partisipasi sekolah pada setiap yang lebih tinggi makin berkurang. (Sumber: BPS. Susesnas 2013-2014)

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas SDM yaitu melalui pendidikan formal atau dikenal pendidikan sekolah. Melalui pendidikan di sekolah diharapkan menghasilkan lulusan yang memiliki sejumlah kompetensi untuk mampu bersaing baik secara regional, nasional maupun internasional. Adapun upaya lain, salah satunya Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Pendidikan terus berupaya untuk mewujudkan pendidikan berkualitas menuju masyarakat cimahi yang cerdas dan berdaya saing. Dalam salah satu media online (Kamaludin, 2017) menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi telah resmi menjalani kerjasama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provisi Jawa Barat, Kamis (16/11/2017). Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna menegaskan sekolah-sekolah di Kota Cimahi harus mampu merencanakan dan melaksanakan program-program dalam peningkatan mutu pendidikan baik sarana maupun prasarananya. Hal tersebut, agar sekolah di Kota Cimahi dapat melayani siswa sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Pada tingkat satuan pendidikan (Sekolah), salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka memperbaiki kompetensi perbaikan untuk mencapai kompetensi lulusan sesuai target standar kompetensi lulusan (SKL) dilakukan melalui perbaikan dan penyehatan manajemen sekolah. Peningkatan mutu layanan pembelajaran tidak terlepas dari proses manajemen sekolah, dimana setiap sumber daya sekolah diolah dan diorientasikan secara terintegrasi/terpadu untuk mewujudkan layanan pembelajaran yang berkualitas. Oleh karena itu, fungsi-fungsi manajemen pendidikan yang terlihat pada proses manajemen sekolah perlu dikembangkan secara sistematis sehingga semua

Formatted: Left

Formatted: Normal

Formatted: Font: Trebuchet MS, 9 pt, Complex Script Font: 9 pt, Bold

Rahma Riyan Diana, 2018
[PENGARUH KESEHATAN PENGANGGARAN TERHADAP MUTU SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA CIMAH!](#)
[Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu](#)

tahapan manajemen sekolah dapat dicapai dan berakibat pada lebih tingginya efektivitas pencapaian tujuan sekolah

Menurut Hendrayat Soetopo (2006: 96) dalam Ali Imron (2013, hlm. 165) salah satu upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah adalah faktor manajemen sekolah. Fungsi dari manajemen sekolah salah satunya adalah penganggaran. Menurut Onismura (2011, hlm. 64-65) Fungsi penganggaran dalam manajemen sekolah memegang peranan yang sangat penting. Karena sekalipun konseptual perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian sudah disusun tetapi jika tidak ditunjang dengan penganggaran yang jelas maka akan mengambat seluruh proses pengelolaan pendidikan.

Belum efektifnya penganggaran mengenai pendidikan merupakan salah satu kendala yang di hadapi pemerintah. Jika mengacu pada UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat ketentuan alokasi dana pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD. Namun, hasil yang diperoleh tidak sebaik seperti yang diterima negara tetangga seperti Vietnam yang juga mengalokasikan porsi anggaran serupa. "Alokasi anggaran pendidikan 20% itu hasilnya mengesankan. Indonesia dan Vietnam sama-sama punya komitmen membelanjakan 20% untuk pendidikan. Tapi dari skor math, science, dan membaca, posisi Indonesia di PISA (*Programme for International Student Assesment*) berada di urutan 52 dari 65 negara, sedangkan Vietnam urutan 8," ujar Sri dalam gelaran Budget Day di Kementerian Keuangan. Dengan lugas dia mengatakan jajaran Kementerian Keuangan selaku pengelola keuangan negara semestinya terohok sebab capaian tersebut menunjukkan ada yang salah dalam pengelolaan anggaran pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah. (<http://www.mediaindonesia.com/read/detail/133353-penganggaran-masih-menjadi-masalah>)

Rahma Riyan Diana, 2018
[PENGARUH KESEHATAN PENGANGGARAN TERHADAP MUTU SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA CIMAHU](#)
[Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu](#)

Formatted: Left

Formatted: Normal

Formatted: Font: Trebuchet MS, 9 pt, Complex Script Font: 9 pt, Bold

Dari data di atas diketahui bahwa sistem penganggaran dalam pendidikan masih menjadi masalah karena antara perencanaan, alokasi, pelaksanaan, dan pelaporan masih belum terintegrasi dengan baik sehingga mengakibatkan rendahnya mutu pendidikan dilihat dari PISA (*Programme for International Student Assessment*).

Mengingat adanya masalah mutu sekolah dan dugaan upaya pemecahannya melalui penganggaran yang sehat, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui proses penelitian dengan judul “Pengaruh Kesehatan Penganggaran Terhadap Mutu Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Cimahi”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan Masalah pada Penelitian ini yaitu: Bagaimana Kesehatan Penganggaran yang dilakukan sekolah dapat mempengaruhi Mutu Sekolah.

Selain itu, Merujuk pada latar belakang di atas beberapa hal yang menjadi pertanyaan penelitian pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Cimahi meliputi hal – hal berikut :

1. Bagaimana kondisi Kesehatan Penganggaran pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Cimahi?
2. Bagaimana Kondisi Mutu sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Cimahi?
3. Seberapa Besar Pengaruh Kesehatan Penganggaran terhadap Mutu Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Cimahi?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Mengetahui pengaruh Kesehatan Penganggaran terhadap Mutu sekolah:

1. Mengetahui bagaimana kondisi kesehatan Penganggaran pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Cimahi

Rahma Riyan Diana, 2018
[PENGARUH KESEHATAN PENGANGGARAN TERHADAP MUTU SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA CIMAH!](#)
[Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu](#)

Formatted: Left

Formatted: Normal

Formatted: Font: Trebuchet MS, 9 pt, Complex Script Font: 9 pt, Bold

2. Mengetahui bagaimana Kondisi Mutu Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Cimahi
3. Mengetahui Seberapa Besar pengaruh Kesehatan Penganggaran terhadap Mutu Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Cimahi

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk berbagai pihak. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu Administrasi Pendidikan, khususnya dalam kajian kesehatan penganggaran dan mutu sekolah. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan kajian lanjutan atau pertimbangan kajian penelitian selanjutnya.
- b. Manfaat Praktis
 1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan pola pikir peneliti khususnya dalam kesehatan penganggaran guna meningkatkan mutu.
 2. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi pihak lembaga khususnya dalam upaya meningkatkan mutu sekolah melalui penganggaran yang sehat.
 3. Bagi dunia pendidikan pada umumnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan sumber pengembangan praktik manajemen sekolah yang lebih baik dan inspirasi untuk lebih memperdalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan kesehatan Penganggaran dan mutu sekolah.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI SKRIPSI

[Rahma Riyan Diana, 2018](#)
[PENGARUH KESEHATAN PENGANGGARAN TERHADAP MUTU SEKOLAH](#)
[PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA CIMAH](#)
[Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |](#)
[perpustakaan.upi.edu](#)

Formatted: Left

Formatted: Normal

Formatted: Font: Trebuchet MS, 9 pt, Complex Script Font: 9 pt, Bold

Untuk mempermudah pembaca melihat dan memahami isi dari penelitian ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.
- BAB II : Kajian Pustaka, berisi konsep-konsep dan teori-teori yang melandasi penelitian, diperoleh dari buku dan sumber-sumber lain yang mendukung. Konsep-konsep dan teori-teori dalam penelitian ini yaitu mengenai mutu pendidikan / sekolah dan kesehatan penganggaran sekolah.
- BAB III : Metode Penelitian, berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian serta komponen-komponen penelitiannya. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.
- BAB IV : Temuan dan Pembahasan, memuat pengolahan atau analisis data beserta pembahasan atau analisis hasil temuan di lapangan dengan pemaparan dan pembahasan data yang disajikan.
- BAB V : Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi, yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.

Formatted: Left

Formatted: Normal

Formatted: Font: Trebuchet MS, 9 pt, Complex Script Font: 9 pt, Bold

Rahma Riyan Diana, 2018
PENGARUH KESEHATAN PENGANGGARAN TERHADAP MUTU SEKOLAH
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA CIMAH!
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Rahma Riyan Diana, 2018
PENGARUH KESEHATAN PENGANGGARAN TERHADAP MUTU SEKOLAH
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA CIMAHU
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Formatted: Left

Formatted: Normal

Formatted: Font: Trebuchet MS, 9 pt, Complex Script Font:
9 pt, Bold